

## **Upaya Pemerintah Medorong Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Bontang Barat**

*Andi Ilham*

### *Abstract*

*The community participation in development planning in the District of West Bontang not achieve optimal results or be able to support the accelerated development of the region. Yet the government's efforts to encourage community participation can bring changes to increase participation, but the changes are not fully participate in the community to support the accelerated development. It can be seen from the results of the discussion on sub focus research shows that community participation in terms of development planning has pretty good indication. It can be seen from his involvement in passing over the proposed program and discussion of proposed social programs in the field of economic activity, pengkatan quality of human resources and infrastructure activities has shown pretty good indication. Community participation in terms of the execution of the development has been pretty good indication. It can be seen from public involvement in implementing the program have been made in the work plan. and community participation in terms of development control, it is quite effective indication. It can be seen from public involvement in monitoring the activities in the field of economic relations, human resources and infrastructure, including quite effective.*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu pemba-ngunan manusia seutuhnya, baik secara materiil dan moril.

Keberhasilan pembangunan nasional yang dicapai selama ini telah mengalami perubahan dan peningkatan, meski demikian belum mentuh ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan masih menimbulkan kesenjangan terutama bagi kehidupan masyarakat pedalaman dan perbatasan dengan perkotaan. Terutama dalam hal mendapatkan peme-nuhan kebutuhan justru masyarakat perbatas-an/pedalaman masih jauh dari harapan. Meskipun pemerintah telah melakukan

berbagai upaya tetapi belum mampu menja-wab semua persoalan yang dihadapi masyarakat, justru masih menyisakan perso-alan yang krusial bagi kehidupan masyarakat.

Berbicara tentang pembangunan tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, dan salah satunya faktor sumber daya manusia. Menempatkan faktor sumber daya manusia sebagai deter-minan penting dalam proses pembangunan, karena kedudukannya bukan hanya sebagai faktor produksi yang hanya dapat digerakkan, tetapi faktor manusia memiliki keunggulan dari pada faktor produksi lainnya, yaitu mampu meng-gerakkan semua potensi sumber daya organisasi. Pentingnya sumber daya manusia dalam proses pembangunan ditandai oleh peran dan fungsinya sebagai penggerak dan perencana sekaligus penentu arah terhadap tujuan organisasi.

Berkenaan dengan proses pemba-ngunan, selain ditentukan oleh faktor sumber daya aparatur tetapi juga tidak terlepas dari peranserta masyarakat, ini berarti tugas pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga diperlukan partisipasi masya-rakat. Sebagaimana yang dikemukakan Siagian (1998 : 22) bahwa : “tugas pemba-ngunan merupakan tanggung jawab bersama suatu bangsa, tugas tersebut tidak memung-kinkan diserahkan sepenuhnya pada peme-rintah saja, tetapi juga diperlukan keterlibat-an dan kerjasama dengan masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahwa pembangunan merupa-kan perpaduan yang melibatkan kehendak pemerintah dan partisipasi masyarakat atau yang disebut dengan istilah pembangunan berbasis partisipasi.. Konsep pembangunan berbasis partisipasi masyarakat tercermin oleh *decentralisation of authority* sebagai-mana yang dikembangkan sekarang ini melalui otonomi daerah.

Untuk mengiringi pelaksanaan otono-mi daerah dalam rangka percepatan pembangunan maka perlu adanya partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam menentukan rencana strategis yang dapat dijadikan sandaran untuk percepatan pemba-ngunan, yaitu mulai membuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengem-bangannya. Dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ada kecenderungan hasil pembangunan akan lebih efektif dan akan membawa perubahan bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah kecamatan Bontang Barat sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seiring dengan upaya pemerintah kota Bontang dalam percepatan pemba-ngunan maka upaya yang dilakukan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program-program sebagaimana yang ditentukan dalam visi dan misi, yaitu ”Terwujudnya Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berke-lanjutan”.

Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat di Kecamatan Bontang Barat, mengingat belum semua warga / penduduk di wilayah tersebut berpartisipasi dalam mendukung program yang telah dibuat sehingga percepatan pembangunan belum mencapai hasil yang optimal. Dari hasil observasi awal menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menyebabkan beberapa permasalahan baru yang muncul dimasyarakat pola pemimpin pada suatu lembaga pemerintahan yang ada di wilayah tersebut, organisasi pemerintahan maupun swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang kurang mengembangkan dan

berperan aktif dalam pembangunan, sumber daya manusia yang kurang dan belum mampu secara produktif berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga menuntut beberapa pihak untuk lebih serius menanggapi dan menangani permasalahan tersebut, salah satunya adalah lembaga pemerintahan yang ada di Kecamatan Bontang Barat

Diharapkan dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan pilihan strategis, untuk menjawab konsep pembangunan yang berbasis partisipasi. Meski demikian tidak cukup mengandalkan partisipasi masyarakat tetapi perlu adanya dukungan anggaran yang memadai, terutama anggaran yang disediakan pemerintah, dan dana yang diperoleh dari partisipasi masyarakat dapat berjalan selaras.

Berdasarkan problem statement di atas mendorong penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam, sehingga dapat diketahui fenomena yang terjadi terutama upaya pemerintah Kecamatan Bontang Barat dalam menumbuhkan partisipasi untuk mendukung perencanaan pembangunan di wilayah tersebut. Disamping itu dapat diketahui mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

### **Konsep Pembangunan**

Dari berbagai teori pertumbuhan ekonomi modern intinya dapat dibagi menjadi dua yakni : 1) menekankan pentingnya akumulasi modal dan 2) peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia. Harrod - Domar menyatakan pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh dua unsur pokok yaitu tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas kapital ( Dalam Kartasasmita 1997 ;11). Namun dalam model pertumbuhan neo klasik memasukkan unsur teknologi yang diyakini akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara ( Solow, 1957 dan Kartasasmita 1997 ; 11 ). Salah satu harapan dari atau anggapan aliran teori pertumbuhan akan dapat dinikmati masyarakat sampai dilapisan paling bawah, namun pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa rakyat dilapisan paling bawah tidak senantiasa menikmati kucuran hasil pembangunan seperti yang diharapkan, bahkan dibanyak negara kesenjangan yang melebar.

Goulet (1997) mengkaji falsafah etika pembangunan yang menyatakan pembangunan harus dihasilkan 1) terciptanya solidaritas baru yang mendorong pembangunan yang berakar dari bawah ( Grass roots oriented ), 2) memelihara keberagaman budaya dan lingkungan dan 3) menjunjung tinggi martabat serta kebebasan manusia dan masyarakat, karena itu dalam kaitan pembangunan yang berkeadilan berkembang konsep pembangunan yang berpusat rakyat. (Kartasasmita, 1997;17) menyatakan bahwa paradigma ini memberikan oeran kepada individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya, dengan demikian pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat.

Paradigma terakhir dalam pembangunan sosial adalah paradigma pembangunan manusia. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang. Dengan demikian tujuan pokok pembangunan menurut Ul Haq (1995) adalah memperluas pilihan - pilihan manusia yang mencakup, *Pertama* pembentukan kemampuan / kapabilitas manusia yang diwujudkan dalam bentuk kesehatan, keahlian yang meningkatkan dan *kedua* penggunaan kemampuan yang telah dipunyai untuk bekerja, menikmati kehidupan atau untuk aktif dalam kegiatan kebudayaan, sosial dan politik. Paradigma pembangunan manusia yang bersifat biolistik ini mempunyai empat unsur penting yaitu: 1) peningkatan aktivitas, 2) pemerataan kesempatan, 3) kesinambungan pembangunan, 4) pemberdayaan manusia.

### **Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Konsep pemberdayaan ini merupakan upaya mencari bentuk konsep pembangunan yang idiil setelah berbagai paradigma pembangunan sebelumnya belum dapat memenuhi harapan sebagian besar umat manusia dimuka bumi. Dimulai dengan teori pertumbuhan ekonomi sejak abad 18 yang dicetuskan oleh Adam Smith (1779) yang menyatakan bahwa proses pertumbuhan diawali apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (*division of labour*) dengan meningkatkan produktivitas pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan (Kartasasmita, 1997 : 10). Dengan demikian konsep pemberdayaan merupakan paradigma terakhir dari konsep pembangunan manusia yang kemunculannya disebabkan oleh karena adanya dua permasalahan yakni kegagalan dan harapan, yaitu gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan dengan harapan-harapan adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai (Friedman, 1992 ; 167). Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah nilai kolektif dari pemberdayaan individu yang merupakan individu yang merupakan cermin dari nilai-nilai kolektif dan moral. Konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif pembangunan pada intinya memberi tekanan yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung ( Friedmann, 1992 ; 168). Berbagai pandangan yang berkembang dalam teori pembangunan, baik dibidang administrasi, menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan. Dengan kata lain masyarakat tidak hanya merupakan sebagai obyek tetapi sebagai subyek, pelaku pembangunan. (Sumodiningrat, 1997 ; 162).

Seiring dengan keberhasilan pembangunan yang ditujukan oleh berbagai statistik pembangunan, terutama membaiknya indikator kesejahteraan rakyat, dijumpai kesenjangan yang belum secara tuntas dapat dipecahkan. Rakyat didaerah pedesaan dan kawasan terpencil hidup didunia lain yang sangat terbelakang dan belum tersentuh boleh kehidupan modern. Karena itu upaya mengatasi kesenjangan dilakukan dengan memelihara momentum dan menyebarkan pertumbuhan ekonomi. Sumodiningrat ( 1997 ; 164) mengatakan

strategi pembangun-an seperti itu punya dua arah, 1) memberi peluang agar sektor dan masyarakat modern dapat tetap maju, oleh karena kemajuannya dibutuhkan untuk membangun bangsa keseluruhan, 2) Memberikan perhatian yang lebih banyak dengan mempersiapkan lapisan masyarakat yang tertinggal dan hidup diluar atau pinggiran jalur kehidupan modern dan strategi ini perlu dikembangkan agar rakyat papan bawah dibantu untuk lebih berdaya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Sedangkan pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Sumodiningrat, 1997; 167). Karena itu untuk memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui 3 jurusan :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan memperkenankan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi ( berdaya) untuk berkembang.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) dengan penyediaan input (masukan) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
3. Melindungi masyarakat dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah ( Sumodingrat, 1997 ; 165).

Dengan demikian untuk menciptakan suatu masyarakat yang berdaya, perlu adanya pemihakan kepada pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang diarahkan secara langsung pada akses rakyat kepada sumberdaya pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat dilapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

Mas'ood (1994;32) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya memberdayakan atau kekuatan kepada masyarakat, dalam upaya ini harus dilakukan dengan berbagai pendekatan, terutama melalui pendidikan dan pelatihan.

Ternyata kebanyakan pejabat tidak menyadari makna sepenuhnya dari istilah pemberdayaan partisipasi, sebagian disebabkan oleh belum adanya konsep operasional mengenai pemberdayaan yang disesuaikan dengan situasi di Indonesia. Dalam era reformasi masyarakat perlu didorong untuk mengorganisir diri mereka sendiri sesuai dengan keinginan dan prakarsa mereka. Kebebasan akan melahirkan lebih banyak kelompok sosial dengan banyak fungsi yang secara langsung berasal dari kepentingan dan sifat keras suatu kelompok atau tradisi dan sifat khas masyarakat setempat.

Salah satu aspek penting dan tantangan yang akan dihadapi dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dalam pembangunan adalah kesadaran dan rasa kebersamaan serta kepedulian masyarakat terhadap kondisi dan perkembangan yang terjadi dalam suatu wilayah. Sebuah instansi pemerintahan, swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya kedepannya akan

dihadapkan pada sebuah tantangan yang beraneka ragam dan sekaligus menuntut kepada arahan dan pengelolaan yang semakin efisien, efektif dan produktif serta profesional.

Untuk mewujudkan situasi demikian perlu meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat bahwa keberhasilan suatu pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, swasta maupun sebuah organisasi saja yang berperan dalam suatu perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasi/pelaksanaan dan controlling / pengawasan akan tetapi masyarakat melalui partisipasinya juga sangat di perlukan. Berarti bahwa sebuah kebijakan dan langkah-langkah apa apapun yang dirumuskan dan diambil dalam suatu keputusan dalam mengelola sumber daya manusia haruslah mengutamakan pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian berbagai jenis tujuan yang telah ditetapkan demi tercapainya keberhasilan suatu lembaga atau organisasi.

Selanjutnya oleh Mubyarto (1993) menyatakan bahwa pemberdayaan lebih berupa tindakan-tindakan yang kongkrit yang dapat meningkatkan kemampuan sumber-sumber daya manusia dan kelem-bagaan. Selain itu praktek pemberdayaan adalah merupakan upaya membuka pengertian atau kesadaran yang lebih luas tentang hak dan kewajiban politik, ekonomi, social, budaya dan hukum. Oleh karena itu, dalam Era Otonomi Daerah yang telah memberikan peluang dan kesempatan bagi daerah untuk menentukan perjalanan arah pembangunan yang lebih baik. Untuk itu, peran Pemerintah Daerah sangat strategis didalam mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun hal tersebut dalam implementasi masih terdapat kepincangan terhadap undang-undang yang telah mengamanatkannya.

### **Partisipasi Masyarakat**

Dalam setiap pelaksanaan perencanaan pembangunan, peranan masyarakat sangat menentukan terhadap keberhasilan dan kesinambungan pembangunan yang diinginkan. Hal ini erat kaitan dengan kondisi dan situasi masyarakat yang bersangkutan, hanya masyarakat itu sendiri yang mengetahui kebutuhan pembangunan yang perlu diprioritaskan. Demikian pula partisipasi masyarakat dalam suatu rencana pembangunan harus sudah dimulai sejak saat perencanaan, kemudian pelaksanaan dan seterusnya pemeliharaan.

Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses yang mungkin membawa kewenangan, yang menurut Heller (1995 :659) menggambarkan sebagai berikut: " Partisipasi masyarakat sebagai sebuah proses dimana individu ambil bagian dalam pembuatan keputusan terhadap suatu lembaga, program dan lingkungan yang mempengaruhinya. Ia menggambarkan dua bentuk partisipasi yaitu: 1) partisipasi *grass root* menunjuk pada pergerakan organisasi dan social diajukan oleh masyarakat yang memilih metode dan tujuan mereka, 2) Partisipasi *Government Mandated* (resmi), dimana partisipasi masyarakat meliputi keperluan yang sah yang telah ada memberikan kesempatan bagi masukkan masyarakat kedalam sebuah kebijaksanaan pengoperasian oleh sebuah agen pemerintahan".

Kemudian Conyers (1994 : 154) menyebutkan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang penting yaitu: "Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat yang tanpa kehadirannya, program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan, dan perencanaannya, karena akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut, alasan yang ketiga, yang mendorong adanya partisipasi umum dibanyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri

Dusseldorp (dalam Slamet 1993; 10) membuat klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi yang didasari pada sembilan dasar yang antara satu sama lain jarang terpisahkan dalam banyak hal mengidentifikasi suatu kegiatan partisipasi yang sama dari sembilan tipe yang ada. Dalam setiap klasifikasi menunjukkan dua macam partisipasi yang dipilih secara tajam, namun kadang kala ada jenis partisipasi yang mungkin berada ditengah dari dua jenis yang tajam" Penggolongan partisipasi menurut Dusseldorp adalah sebagai berikut :

1. Penggolongan partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa. Partisipasi bebas terjadi bila seorang individu melibatkan diri secara sukarela didalam suatu kegiatan partisipatif. Partisipasi bebas dapat digolongkan dalam dua sub kategori yaitu: a) partisipasi spontan dimana berdasarkan keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga atau orang lain, b) partisipasi terbujuk yaitu bila seorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela dalam aktifitas kelompok tertentu. Partisipasi terpaksa dapat dilakukan karena a) terpaksa oleh hukum dan b) partisipasi terpaksa karena keadaan kondisi sosial ekonomi. Partisipasi terpaksa oleh hukum adalah partisipasi yang terjadi apabila orang dipaksa melalui aturan-aturan atau hukum, partisipasi didalam kegiatan tertentu bertentangan dengan keyakinan dan tanpa melalui persetujuan mereka. Sedangkan partisipasi terpaksa karena kondisi sosial ekonomi dimana ada program yang sebenarnya enggan dia ikuti tetapi karena kesulitan ekonomi dan pengaruh sosial dia terpaksa mengikuti
2. Penggolongan partisipasi berdasar pada cara keterlibatan yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi bila seorang itu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi seperti berperan dalam pertemuan, turut berdiskusi, sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi seseorang mendelegasikan hak partisipasinya dalam pengambilan keputusan, sehingga diwakilkan kepada orang lain.
3. Penggolongan partisipasi berdasarkan pada keterlibatan didalam berbagai tahap didalam proses pembangunan berencana. Disini terdapat enam langkah partisipasi a) Perumusan tujuan b) penelitian c) Persiapan rencana d) penerimaan rencana e) pelaksanaan dan f) evaluasi. Terhadap kesemua kegiatan tersebut dapat digolongkan kedalam dua kategori keikut serta yaitu: pertama partisipasi lengkap dimana setiap individu mengikuti semua kegiatan

dan kedua partisipasi tidak lengkap dimana individu tersebut hanya mengikuti sebagian dari tahapan yang ada dan seharusnya diikuti.

4. Penggolongan partisipasi pada tingkat organisasi yaitu 1) partisipasi yang terorganisir dimana adanya struktur organisasi dan seperangkat kerja yang dikembangkan dalam suatu proses persiapan, 2) partisipasi yang tidak terorganisir dimana seseorang hanya berpartisipasi dalam tempo tertentu dan umumnya terjadi dalam keadaan yang gawat (kebakaran, gempa dan bencana alam lainnya).
5. Penggolongan partisipasi berdasarkan pada lingkup kegiatan yaitu a) partisipasi terbatas yaitu bila seluruh kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu cepat diawasi oleh dan kejadian sasaran kegiatan yang membutuhkan partisipasi anggota komunitas itu, b) partisipasi terbatas yang terjadi apabila hanya sebagian kegiatan sosial, politik administratif dan lingkungan yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan partisipatif.
6. Penggolongan partisipasi berdasarkan intensitas dan frekwensi kegiatan yaitu a) Partisipasi intensif b) partisipasi ekstensif terjadi bila pertemuan-pertemuan diselenggarakan secara tidak teratur dan membutuhkan interval waktu yang lama.
7. Penggolongan partisipasi berdasarkan efektifitas a) partisipasi efektif yaitu kegiatan yang telah menghasilkan perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktifitas partisipasi, b) partisipasi tidak aktifitas partisipasi yang direncanakan terwujud,
8. Penggolongan partisipasi berdasarkan pada siapa yang terlibat yaitu; a) Anggota masyarakat yang terdiri dari penduduk dan pemimpin setempat, b) Pegawai pemerintah yang penduduk dalam masyarakat dan bukan penduduk setempat, c) Orang luar yang sudah menjadi penduduk atau bukan penduduk
9. Pengolompokkan partisipasi berdasarkan gaya partisipasi. Rothman (dalam Slamet 1992 ;21) membedakan tiga model praktek organisasi masyarakat. Dalam setiap model itu terdapat perbedaan tujuan-tujuan dan perbedaan dalam gaya partisipasi utama melibatkan orang-orang adalah untuk mencocokkan sebesar mungkin

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan adalah merupakan perilaku anggota masyarakat yang berupa ambil bagian aktif dalam hal-hal pembuatan keputusan (Domai 1992 ; 252) kemudian Goulet (1989 ;225) partisipasi dikonsepsikan secara baru sebagai suatu "intensif moral" yang mengizinkan kaum miskin yang tidak berdaya untuk merundingkan " insentif-insentif materil" yang baru untuk diri mereka dan sebagai suatu titik terobos yang memperbolehkan para pelaku kecil berhasil mendapatkan jalan masuk menuju bidang-bidang makro pembuatan keputusan. Dengan demikian partisipasi merupakan aspek terpenting dalam upaya memberdayakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Feire (dalam Goulet, 1989) adalah orang yang paling tegas menyatakan kepada elit pembuat keputusan mengenai sangat penting partisipasi dalam pembangunan. Bagi Freire, batu uji tertinggi keautentikan pembangunan adalah: "Apakah rakyat yang sebelumnya melulu diperlakukan sebagai subyek, yang hanya diharuskan tahu dan melaksanakannya, sekarang dapat secara aktif



menyadari dan bertindak yang karenanya menjadi suyek tujuan hidup kemasyarakatannya sendiri. Kalau rakyat ditekan dan dimerosotkan kedalam budaya diam, mereka tidak berpartisipasi dalam pemanusiaan mereka sendiri. Sebaliknya jika rakyat dimampukan untuk berpartisipasi sehingga menjadi subyek aktif yang sadar dan bertindak, mereka akan merancang sejarah manusianya dalam arti yang sebenarnya dan melibatkan diri dalam proses pembangunan yang autentik".

### **Tipologi Partisipasi**

Tipologi partisipasi menggambarkan derajat keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi yang didasarkan pada seberapa besar kekuasaan (*power*) yang dimiliki masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kegunaan dari adanya tipologi partisipasi ini adalah: a) untuk membantu memahami praktek dari proses pelibatan masyarakat, b) untuk mengetahui sampai sejauh mana upaya peningkatan partisipasi masyarakat, dan c) untuk menilai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja dari pihak-pihak yang melakukan pelibatan masyarakat.

### **Tipologi Tangga Partisipasi Arnstein**

Sherry Arnstein (1969) adalah yang pertama kali mendefinisikan strategi partisipasi yang didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat (komunitas) dengan badan pemerintah (agency). Dengan pemyataannya bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*citizen partisipation is citizen power*), Arnstein menggunakan metafora tangga partisipasi dimana tiap anak tangga mewakili strategi partisipasi yang berbeda yang didasarkan pada distribusi kekuasaan. Tangga terbawah merepresentasikan kondisi tanpa partisipasi (*non participation*), meliputi: (1) manipulasi (*manipulation*) dan (2) terapi (*therapy*). Kemudian diikuti dengan tangga (3) menginformasikan (*informing*), (4) konsultasi (*consultation*), dan (5) penentraman (*placation*), dimana ketiga tangga itu digambarkan sebagai tingkatan tokenisme (*degree of tokenism*). Tokenisme dapat diartikan sebagai kebijakan sekademya, berupa upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. Jadi sekadar menggugurkan kewajiban belaka dan bukannya usaha sungguh-sungguh untuk melibatkan masyarakat secara bermakna. Tangga selanjutnya adalah (6) kemitraan (*partnership*), (7) pendelegasian wewenang / kekuasaan (*delegated power*), dan (8) pengendalian masyarakat (*citizen controls*).

### **Tipologi Partisipasi Burns, Hambleton, dan Hogget**

Burns, et al (1994 : 172) berpendapat bahwa bila pemerintah hendak meningkatkan partisipasi masyarakat, maka harus diketahui terlebih dahulu sarnpai sejauh mana jenjang proses partisipasi yang telah ada. Untuk itu Burns memodifikasi model Arnstein yang dirasakan lebih tepat terhadap kebutuhan publik (kewenangan masyarakat lokal) dalam rangka mengembangkan partisipasi masyarakat, pemberdayaan, dan perubahan tata kelola pemerintahan di daerah. Burns menjeiaskan bahwa terdapat kemungkinan untuk menambah jenjang antara tangga partisipasi yang satu dengan yang lainnya meski terkesan lebih rumit dan memberikan kebebasan untuk menghapus atau menambah jenjang menurut situasi

yang ada. Lebih lanjut dikatakan bahwa bahwa kualitas partisipasi masyarakat tidak harus menempati tangga tertinggi dalam waktu yang sangat cepat. Semua harus didasarkan pada situasi dan kondisi masyarakat.

### **Tipologi Partisipasi Pretty**

Dengan mengadaptasi tipologi partisipasi Arnstein, Pretty (1995), diacu dalam Ahmad (2004), mengembangkan pendekatan yang berbeda berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu (1) kemauan, (2) kemampuan, dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Slamet, 1992). Menurut Sahidu (1998), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif, harapan, kebutuhan (*needs*), imbalan (*rewards*), dan penguasaan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal dan pengalaman yang dimiliki.

Selanjutnya, disamping faktor yang mendukung partisipasi masyarakat terdapat pula faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat. Para ahli telah mengidentifikasi hal-hal yang menghambat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Menurut Soetrisno (1995), faktor-faktor penghambat itu adalah: (1) belum dipahaminya konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan. Partisipasi dipahaminya sebagai kemauan rakyat untuk mendukung program pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah, (2) adanya reaksi yang menghambat proses pembangunan seperti keengganan masyarakat untuk ikut berperan serta seperti mengevaluasi proses pembangunan secara kritis dan terbuka (budaya diam), aparat bersikap otoriter, dan kurang terbuka terhadap aspirasi masyarakat (budaya mencari selamat), (3) adanya peraturan-peraturan pemerintah yang menghambat kemauan rakyat untuk berpartisipasi.

Menurut Abe (2001) mengidentifikasi setidaknya enam faktor penghambat masyarakat untuk berpartisipasi, yaitu: (1) keterbatasan pengetahuan masyarakat sehingga secara teknis sulit berpartisipasi (misalnya pendidikan yang rendah dan kemampuan baca tulis), (2) masyarakat berada dalam politik sentralistik otoriter sehingga membudaya politik "mengekor", pasif, takut mengambil inisiatif dan hidup dalam budaya petunjuk, (3) rakyat berada dalam represi ideologi dimana kesadaran politik rakyat diduga merupakan kesadaran hasil bentukan negara, (4) aspirasi yang disampaikan rakyat adalah aspirasi pantulan (*refleksi*) aspirasi negara, (5) rakyat telah kehilangan institusi lokal, sebagai akibat dan tekanan politik elit, (6) langkanya kepercayaan diri, sehingga rakyat tidak terbiasa jujur mengatakan apa adanya meskipun bertentangan dengan pemerintah.

### **Perencanaan Pembangunan**

Handyaningrat (1980; 125) memberikan pengertian perencanaan adalah keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang akan dilakukan, bila mana yang akan dilakukan dan siapa yang akan melakukan. Tjokromidjojo (1994 ; 189) mendefinisikan perencanaan merupakan suatu proses yang continue dan proses itu meliputi dua aspek yaitu formulasi rencana dan pelaksanaannya. Soewignyo (1985 ; 24) menyebutkan perencanaan adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang. Sesuai dengan pengertiannya maka terdapat beberapa pendapat mengenai batasan mengenai definisi perencanaan. Garth, Faclan dan Newman ( dalam Handyaningrat, 1990 ; 126) mendefinisikan perencanaan secara berturut-turut sebagai berikut, Garth dalam kaitan dengan proses mengatakan "*planning is the process of selecting and developing the course of action to accomplish an objective*" ( perencanaan adalah proses pemilihan dan pengembangan daripada tindakan yang paling baik menguntungkan mencapai tujuan). Selanjutnya Fachlan, mendefinisikan perencanaan dalam kerangka tujuan yaitu "*planning is the function where by executive anticipate the probable effects of forces that will change the activities and objective of their business*" ( perencanaan adalah dimana pimpinan kemungkinan menggunakan pengaruh dari-pada kewenangannya yang dapat mengubah kegiatan dan tujuan daripada tujuan organisasi). Dan Newman memberikan definisi perencanaan dalam kaitan dengan keputusan yaitu "*Planning is deciding in advance what is to be done, that is the plan, is projected a course of action*" ( perencanaan adalah keputusan apa yang dikerjakan untuk waktu yang akan datang yaitu suatu rencana yang akan diproyeksikan dalam suatu tindakan).

Kartasasmita (1996; 252 ) menyatakan perencanaan pembangunan yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat luas meliputi 1) mengenali masalah-masalah mendasar yang menyebabkan terjadinya kesenjangan, 2) mengidentifikasi alternatif yang dipilih dengan memperhatikan azas efektifitas dan efisiensi.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas maka jelaslah bahwa perencanaan dianggap sebagai suatu proses, dianggap sebagai suatu fungsi dan dapat dianggap sebagai suatu keputusan. Perencanaan sebagai suatu proses karena perencanaan adalah suatu tindakan pemilihan yang terbaik / menguntungkan dari berbagai alternatif dalam usaha pencapaian tujuan. Adapun perencanaan sebagai suatu fungsi manajemen dimana pimpinan ( manager ) wajib melakukan suatu perencanaan sebagai pedoman dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan perencanaan sebagai keputusan ialah untuk kejelasan apa yang akan dilakukan, bilamana akan dilakukan dan siapa yang akan melakukan.

Di Indonesia, apabila dilihat dari sistem pelaksanaannya maka perencanaan pembangunan dapat dibagi dalam tiga dimensi, yaitu 1) perencanaan menurut jangkauan jangka waktu, 2) perencanaan menurut dimensi pendekatan dan koordinasi, dan 3) perencanaan menurut proses hierarki penyusunan. Perencanaan menurut jangka waktu biasanya dikenal sebagai perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Kaitan antara ketiga rencana tersebut menunjukkan perbedaan ini dan tingkat kedalaman atau penilaian dari masing-

masing rencana, semakin pendek jangka waktu rencana, semakin rinci isi rencana tersebut, dengan demikian semakin tepat perkiraan tujuan, sasaran, cara atau jalan mencapai sasaran atau tujuan, serta kemampuan dan kekuatan sumberdaya yang tersedia akan digunakan untuk melaksanakannya jalan yang akan dipilih untuk mencapai sasaran/tujuan tersebut (Kartasasmita, 1997: 110). Soewignyo (1985:24) menyatakan bahwa kurangnya pengaturan perencanaan merupakan suatu hambatan, rencana yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan potensi yang tersedia, hanya bersifat keinginan-keinginan tanpa memperhatikan keterbatasan-keterbatasan, baik yang bersumber dari desa itu sendiri maupun pemerintah tingkat atas.

### **Partisipasi Dalam Pembangunan**

Pembangunan Desa bertujuan ingin mewujudkan pembangunan masyarakat desa yang seutuhnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah berupa Pembangunan Fisik, Mental dan Spiritual. Pembangunan Fisik adalah pembangunan sarana prasarana fisik dan infrastruktur pendukung lainnya dalam suatu wilayah atau dalam lingkungan kerja dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembangunan desa masih memiliki beberapa kendala-kendala yang cukup mendasar yaitu: Kesenjangan antar Wilayah, Faktor Penduduk, Konflik Penggusuran lahan dan Kemiskinan. Sektor Agribisnis memiliki nilai yang strategis untuk membantu menjawab permasalahan tersebut. Pengelolaan pembangunan pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atau pembinaan sampai dengan pemeliharaan dan tindak lanjut hasil pembangunan. Disini dimaksudkan adanya fungsi pengelolaan pembangunan secara utuh. Dengan demikian pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat, seharusnya memenuhi kriteria, bahwa pembangunan itu: a) Direncanakan secara cermat, b) dilaksanakan secara tertib, c) dibina secara baik, dan d) dipelihara, ditindak lanjuti, dan dikembangkan oleh masyarakat

Untuk memberi makna suatu pembangunan itu betul-betul pembangunan masyarakat desa, maka dituntut adanya partisipasi secara aktif dari masyarakat. Jhaana Bhattacharyya (1990; 20, dalam Ndharma, 1990 ; 120) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Mubiyarto (1984:35) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang, tanpa berarti mengorbankan diri sendiri. Nelson (dalam Bryant dan White, 1982; 206) menyebutkan dua macam partisipasi antara sesama warga atau suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan atau antara masyarakat suatu keseluruhan dengan pemerintah yang dinamakan partisipasi vertikal. Keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut sebagai partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kelompok dapat disebut partisipasi individu. Disamping itu partisipasi dapat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa. Jika masyarakat desa yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan

suatu proyek didesanya, proyek tersebut pada hakekatnya bukanlah proyek pembangunan desa (Peter Do Soutoy, 1959, dan Ndraha, 1990; 103).

## **PEMBAHASAN**

Untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan maka pada item ini akan mendeskripsikan sub fokus penelitian yang ditetapkan yaitu Sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah mendorong partisipasi masya-rakat mampu membawa perubahan yang berarti terhadap peningkatan partisipasi dalam mendukung pembangunan. Meskipun dalam membangun partisipasi masyarakat belum mencapai hasil yang optimal tetapi dari tindakan yang dilakukan ternyata mampu menumbuhkan partisipasi masya-rakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Sesuai hasil temuan di lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **Parisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan**

Upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam Perencanaan pembangunan, dapat diketahui dari rencana kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintahan kelurahan di kecamatan Bontang Barat ternyata telah menghasilkan rencana kerja yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk dilaksanakan. Rencana kerja yang dibangun melalui partisipasi masyarakat adalah dibidang ekonomi kerakyatan, bidang sumber daya manusia dan bidang Infrastruktur. Untuk mengetahui lebih lanjut realitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemba-ngunan dapat dilihat dari penyampaian usulan program dan pembahasan usulan program.

### **Penyampaian usulan program**

Dari hasil observasi mengenai penyampaian usulan progran yang dilakukan melalui pada pertemuan-pertemuan kelom-pok, bahwa telah menunjukkan indikasi cukup baik. Hal tersebut tercermin beberapa usulan yang disampaikan, berdasarkan skala prioritas telah mendapat tanggapan positif dari sebagian besar warga yang hadir. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan yang berasal dai warga kelurahan Kanaan bahwa terutama usulan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembuatan dam atau pintu air sebanyak 4 buah. Nampaknya telah mendapat sambutan baik oleh warga masyarakat. Karena pembangunan Dam atau pintu air dalam kondisi sekarang sangat diperlukan mengingat pengalaman tahun sebelumnya, bahwa daerah tersebut mengalami kesulitan air. Dengan dibangunannya tempat penam-pungan air dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah ketika mengalami musim kemarau. Selain usulan pembangunan bidang ekonomi juga yang tidak mau kalah pentingnya adalah bidang sumber daya manuia. Nampaknya hal tersebut mendapat perhatian masyarakat, mengingat terbatasnya kompetensi sumber daya manusia maka perlu dikembangkan sesuai bakat dan profesi yang dimiliki. Nampaknya dari hasil musyawarah warga mengenai usulan pembangunan bidang sumber daya manusia telah mendapatkan perhatian masyarakat. Rencana kegiatan yang diusulkan untuk meningkatkan

kompetensi sumberdaya manusia adalah melalui berbagai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan keahlian dan natinya dapat digunakan sebagai modal kerja untuk pengembangan usaha.

Dengan demikian upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bontang Barat menunjukkan indikasi cukup sukses. Hal tersebut tercermin oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti alur pembicaraan mengenai rencana usulan kegiatan yang disampaikan warga melalui rapat/pertemuan yang dilakukan pemerintah kecamatan, ternyata mendapat sambutan baik oleh sebagian besar peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut. Dari 3 (tiga) usulan yang diajukan ternyata mendapat perhatian besar untuk ditindak-lanjuti, terutama bidang ekonomi, bidang sumberdaya manusia, dan bidang infrastruktur. Karena dua bidang tersebut memang menjadi skala prioritas yang harus diutamakan.

### **Pembahasan usulan program.**

Upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk percepatan pembangunan, selain ditempuh melalui penyampaian usulan program maka langkah selanjutnya adalah pembahasan terhadap usulan program yang dibuat dalam rencana kerja/kegiatan, baik dibidang ekonomi kerakyatan, sumberdaya manusia maupun bidang infrastruktur. Dari hasil observasi di obyek penelitian menunjukkan bahwa setiap usulan yang disampaikan melalui musyawarah warga ternyata menghasilkan suatu mufakat bersama atau suatu hasil keputusan bersama atas rencana kerja yang diusulkan. Dengan demikian jelaslah bahwa penentuan / penetapan rencana kerja harus mendapatkan kesepakatan bersama. Untuk memenuhi kualifikasi yang diharapkan dalam mendapatkan kesepakatan dari berbagai pihak atas usulan kegiatan yang direncanakan telah dilakukan melalui forum musyawarah. Dari forum musyawarah tersebut ternyata setelah dilakukan pembahasan menghasilkan suatu mufakat atau kesepakatan atas rencana kegiatan sebagai-mana yang telah ditentukan. Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam melakukan pembahasan terhadap rencana kegiatan, baik bidang ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur termasuk cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari keterlibatan warga masyarakat dalam rapat/pertemuan yang difasilitasi pemerintah dalam melakukan pembahasan atas usulan program yang dibuat masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Kecamatan Bontang Barat..

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan**

Upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mempercepat pembangunan maka harus didukung dengan komitmen yang kuat oleh para pelaksana. Kegagalan suatu program yang sering terjadi disebabkan oleh pelaksana yang kurang konsisten. Sehubungan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan maka yang dapat dilakukan selain dibutuhkan pelaksana yang konsisten tetapi juga dibutuhkan partisipasi masyarakat. Kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, agar mendapat dukungan secara luas dari masyarakat maka dalam implementasi juga harus dapat melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan pembangunana dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu sebagai penanggungjawab pekerjaan dan sebagai pekerja tenaga kerja.

### **Partisipasi Masyarakat Sebagai Penanggung Jawab**

Partisipasi masyarakat sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan merupakan manifestasi pembangunan yang berbasis partisipasi. Karena itu perlu keterlibatan masyarakat untuk mendukung program-program yang telah ditentukan. Perlu disadari bahwa dalam mewujudkan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah tetapi dibutuhkan peran serta/partisipasi masyarakat. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia, dan khususnya pemerintah Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ternyata tidak dimonopoli oleh pemerintah kecamatan tetapi telah melibatkan masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut tercermin oleh keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan dibidang ekonomi, seperti penyaluran dana bantuan untuk modal usaha dalam rangka pengembangan usaha. Kemudian dari bidang sumber daya manusia, ternyata masyarakat telah melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah Kecamatan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sesuai bakat dan profesi. Sedangkan ditinjau dari aspek infrastruktur ternyata keterlibatannya warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan irigasi, dan jalan telah dilakukan dengan cara gotong royong.

Dengan demikian upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat ditinjau dari segi tanggung jawab secara implementatif termasuk cukup baik. Hal tersebut tercermin pada keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik dibidang ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur dapat terlaksana, sesuai rencana kerja meskipun hasil yang dicapai kurang optimal. Hal tersebut disebabkan masih beragamnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah tersebut.

### **Partisipasi Masyarakat sebagai Pekerja Tenaga Kwerja**

Sub fokus penelitian yang ditetapkan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat diukur melalui partisipasi masyarakat sebagai pekerja tenaga kerja. Dalam hal ini pengukuran partisipasi masyarakat tidak hanya dilakukan melalui sumbangan dalam bentuk material tetapi hal tersebut dapat dilakukan melalui dalam bentuk tenaga/fisik. Seperti yang dilakukan terhadap pembangunan infrastruktur justru partisipasi masyarakat diapresiasi dalam bentuk tenaga/fisik. Hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan warga masyarakat dalam membangun irigasi, perbaikan parit dan kebersihan jalan telah dilakukan secara bersama-sama (gotong royong). Meskipun pembangunan partisipasi yang dilakukan melalui sumbangan tenaga belum sepenuhnya mendapat respon warga tetapi secara representatif jumlah warga masyarakat yang terlibat dalam meningkatkan pembangunan di wilayah Kecamatan Bontang Barat termasuk cukup baik.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan**

Pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar setiap aktivitas dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja. Pentingnya pengawasan dalam suatu kegiatan agar tercapainya efektivitas dan efisiensi pembangunan. Berkenaan dengan tugas pembangunan dan pelayanan umum maka pengawasan harus dilakukan lebih efektif agar mampu memegang teguh etika profesi. Oleh karena itu pengawasan harus ditingkatkan agar semua program dapat diselesaikan lebih efektif dan efisien. Dalam hal pengawasan terkait dengan pembangunan di wilayah Kecamatan Bontang Barat tidak selalu dilakukan oleh pihak instansi pemerintah, tetapi diperlukan partisipasi masyarakat.

Dari hasil observasi di obyek penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dibuat dalam rencana kerja, seperti kegiatan bidang ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur termasuk cukup efektif. Masyarakat selalu mengikuti perkembangan yang terjadi mulai dari perencanaan dalam menentukan program kerja, hingga proses kegiatan yang dilakukan sesuai rencana kerja. Seperti pengawasan terhadap pelaksanaan dana bantuan bergulir telah diawasi secara ketat, baik mulai dari perencanaan hingga dalam proses kegiatan. Indikasi lain dapat diketahui mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan. dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, Masyarakat terus melakukan pemantauan terhadap proses kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan keterampilan dan keahlian warga masyarakat. Disamping partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan ekonomi dan sumber daya manusia juga terhadap pembangunan infrastruktur. Tindakan yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk partisipasi sekaligus sebagai manifestasi untuk meningkatkan pembangunan.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor yang mendukung meliputi :

- a. Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat. Karena kebijakan tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.
- b. Peraturan Walikota Nomor 05 tahun 2006 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Bontang. Dengan adanya kebijakan tersebut maka pemerintah kecamatan Bontang Barat dapat memanfaatkan dan mendayagunakan potensi yang dimiliki.
- c. Adanya komitmen yang kuat Camat Bontang Barat beserta pimpinan instansi vertikal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan di wilayah tersebut
- d. Kondusifnya keadaan stabilitas keamanan lingkungan kerja Kantor Camat Bontang Barat pada umumnya, dan memungkinkan dapat menumbuhkan



partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan di wilayah tersebut.

Faktor yang menghambat meliputi ;

- a. Partisipasi masyarakat belum sepenuhnya mendukung percepatan pembangunan di Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, baik secara fisik maupun non fisik, sehingga hasil pembangunan belum mencapai secara optimal.
- b. Kurang optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pemahaman pada masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah Kecamatan Bontang Barat, sehingga hasil pembangunan yang dicapai selama ini kurang optimal

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bontang Barat belum sepenuhnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dapat mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut.. Meski demikian upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dapat membawa perubahan terhadap peningkatan partisipasi, tetapi perubahan tersebut belum sepenuhnya masyarakat berpartisipasi untuk mendukung percepatan pembangunan..
2. Partisipasi masyarakat ditinjau dari perencanaan pembangunan telah menunjukkan indikasi cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatannya dalam penyampaian usulan program dan pembahasan usulan program, baik dibidang kegiatan ekonomi kemasyarakatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kegiatan bidang infrastruktur telah menunjukkan indikasi cukup baik.
3. Partisipasi masyarakat ditinjau dari pelaksanaan pembangunan telah menunjukkan indikasi cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan program yang telah dibuat dalam rencana kerja.
4. Partisipasi masyarakat ditinjau dari pengawasan pembangunan, ternyata menunjukkan indikasi cukup efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan dibidang ekonomi kemasyarakatan, sumber daya manusia dan infrastruktur termasuk cukup efektif.
5. Faktor-faktor yang mendukung antara lain Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat, Peraturan Walikota Nomor 05 tahun 2006 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Bontang, Kuatnya komitmen Camat Bontang Barat

beserta pimpinan instansi vertikal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan. Sedangkan faktor yang menghambat adalah Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan di Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, baik secara fisik maupun non fisik, dan kurang optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pemahaman pada masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah Kecamatan Bontang Barat, Terbatasnya kemampuan tenaga pendamping yang terlibat dalam pembangunan di Kecamatan Bontang Barat, dan terbatasnya alokasi dana pembangunan.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diajukan saran-saran pada perbaikan dan penyempurnaan program pembangunan desa ke depan, sebagai berikut:

1. Diperlukan pelatihan, pendampingan atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap usulan yang sifatnya merupakan kebutuhan desa dan bukan keinginan semata, agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Perlu dipertimbangkan alokasi dana yang lebih relevan dengan kemampuan pemerintah, sehingga lebih efektif jika dirasionalisasi dan alokasi dana setiap tahun dilakukan secara konsisten.
3. Perlu pengawasan secara langsung dari masyarakat, disamping pemerintah desa dan BPD.
4. Diperlukan strategi pembangunan desa yang mampu melibatkan masyarakat secara optimal, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonimus, Undang-undang Nomor. 32 dan 33 tahun 2004, tentang *pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah*, Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Gerbangsepaku Sebagai Model Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara*, Provinsi Kalimantan Timur.
- \_\_\_\_\_, 1997. “*Kebijakan Pembangunan Pedesaan Di Negara-negara Berkembang, Skala Permasalahan dan Hakekatnya*”. Dalam *Kebijakan Publik dan Pembangunan*. IKIP Malang.
- Abdul Wahab, Solichin 1999. “*Kebijakan Pembangunan Pedesaan Di Negara-negara Berkembang, Skala Permasalahan dan Hakekatnya*”. Dalam *Kebijakan Publik dan Pembangunan*. IKIP Malang.
- Abe, Alexander, 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pembaharuan Jakarta.
- Abrahamsen, Rita, 2004 (terj). *Sudut Gelap Kemajuan Relasi Kuasa Dalam Wacana Pembangunan*, Lafald Pustaka, Yogyakarta.

- Adisasmita, Raharjo, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2006. *Membangun Desa dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Arnstein S.R, 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. JAIP, Vol 35 No.4, Juli 1969.
- Bowman, Ann O'M. & Kearney, Richard C., 2000. *The Essentials State And Local Government*, Houghton Mifflin Company, Boston *Democracy*. London: Mac Millan Press
- Bratakusumah, Supriady, Dedy dan Solihin, Dadang. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Brannen, Julia. 1997. *Memandu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Fakultas Tarbiah IAIN. Antasari. Samarinda.
- Bryant C. Dan L.G.White, 1989. *Manaje-men Untuk Pembangunan Negara Berkembang*, LP3ES. Jakarta.
- Burns D, Hambleton, Hogget. 1994. *The Politics of Decentralisation : Revitalising Local Chambers Robert*, 1996. *Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif*. Kerjasama Kanisius dengan Yayasan Mitra Tani. Jogyakarta.
- Dhal Robert, 2001. *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Etzioni-Halevy, Eva, 1983. *Buruecracy and Democracy A Political Dilemma*, Routledge & Kegan Paul, London.
- Gazpers, Vincent, 1997. *Manajemen Bisnis Total Dalam Era Globalisasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hasibuan, 2001. *Manajemen Sumber Daya manusia, Dasar dan Kunci Keberhasilan*. Haji Masagung. Jakarta.
- Hodge. 1993. *Economic Development*, New York; Mc Graw-Hill Book Company.
- Held, David., 2004 (terj). *Demokrasi dan Tatanan Global Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Islamy M, Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Keban, Yeremias T., 2004 *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu*, Gaya Media, Yogyakarta.
- Miles, MB, dan Huberman. 2004. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* terjemahkan oleh T.R. Rohidi. Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Peneli-tian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung.
- Mochtar, Hilmy. 2004. *Politik Lokal dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

- Mubyarto. 1985. *Partipasi dan Demokrasi di Pedesaan*. Suara Himpunan III (4) Jakarta.
- Muluk, MR. Khairul. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Ndara, T. 1987. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Bina Aksara. Jakarta.
- Osborne, David dan Gaebler. 2000.. *Mewirusahaakan Birokrasi, Reinventing Government, Transformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*, Penerjemah Abdul Rosyid, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Prasojo, Eko. 2004. *People and Society Empowerment: Perspektif Mem-bangun Partisipasi Publik*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol.IV. No. 02, Maret-Agustus 2004.
- Rasyid, M. Ryaas,. 1997. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik)* Bagian Kedua. Mandar Maju. Bandung
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Simanjutak, J., Pajaman. 1992. *SDM, Kesiapan Kerja dan Pembangunan Ekonomi*. Lembaga Penerbit Fakul-tas Ekonomi UI. Jakarta.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*, Universitas Negeri Malang Press. Malang.
- Thoha, Miftah., 1999, *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Media Widya Mandala, Yogyakarta.
- Tjakroadjojo, Bintoro. 1992. *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1997. *Manajemen Pembangunan*, Haji Mas Agung, Jakarta.
- Utomo, Warsito. 1996. *Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Di Daerah Tingkat II* (Studi Kasus di Kabupaten Cilacap dan Kudus, Disertasi)